

**PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN,PERAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN,KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DI MODERASI OLEH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru)**

Oleh :
Khairul Badri
Pembimbing:Azwir Nasir dan Rahmiati Idrus

Faculty of economics Riau university ,pekanbaru,Indonesia
Email:khairul.badri@ymail.com

The effect budgetary participation ,the role of authority of the budget user clarity of budget goal,organizational culture as moderating variabel on the regional government performance

ABSTRACT

This Study aims to identify and analyze the effect of budgetary participation,the role of authority of the budget user,clarity of budget goal.organizational culture as moderating variabel on the regional government performance.primary data were collected using a survey of civil servant (PNS) in 32 work units (SKPD) Pekanbaru city government consisting of 96 people head on education public and employment head section and sub-section .the sampling technique used purposive sampling,analysis of the data in this study using multiplelinear regression analysis by using spss version 20.0 The result of this study show that organizational culture as moderating variabel has no effect relation the role of authority of the budget user and the regional government performance

Keyword:participation,budgetery,moderation,organizational culture and performance

PENDAHULUAN

Indonesia menganut asas desentralisasi yang memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan melalui Otonomi Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang terbaru Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan asas-asas pelayanan publik yang didalamnya meliputi : transparansi, akuntabilitas, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hal, dan kewajiban.

Setiap organisasi termasuk pemerintah pusat maupun daerah dalam menjalankan tugasnya wajib mempunyai perencanaan yang disusun dan akan dijadikan pedoman pada saat melaksanakan tugas. Oleh karena itu pemerintah merumuskan berbagai kebijakan yang diatur dalam bentuk anggaran. Didalam anggaran akan dapat dilihat seberapa besar fungsi pemerintah dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya dan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhinya. Sebagai salah satu implementasi dari akuntabilitas kinerja pemerintah, maka dilaksanakan kewajiban pertanggungjawaban yang dimulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan atas tugas dan fungsi pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk penetapan anggaran. Sedangkan pedoman evaluasi kinerja pemerintah daerah diatur dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pedoman Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran Setelah Berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian berubah menjadi undang undang no 32 tahun 2004 dan di sempurnakan kembali dengan undang undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Proses penganggaran daerah dengan pendekatan kinerja dalam undang undang no 12 tahun 2008 pasal 179 menyatakan bahwa ,APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah ,dan dalam

permendagri no 13 tahun 2006 yang di sempurnakan dengan permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah kemudian di sempurnakan kembali dengan keluarnya permendagri nomor 27 tahun 2013 tentang pengelolan keuangan daerah yang memuat pedoman penyusunan rancangan APBD yang di laksanakan oleh tim anggaran pemerintah daerah bersama sama sama dengan unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai penjabaran rencana strategis (renstra)

Berdarkan masalah di atas maka masalah yang di teliti selanjutnya dapat di rumuskan dalam bentuk pertanyaan pertanyaan sebagai berikut: 1)apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah 2)apakah peramn kuasa pengguna anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah 3)apakah kejelasan tujuan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah 4)apakah budaya organisasi memoderasi partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparatur pemerintah daerah 5)apakah budaya organisasi memoderasi peran kuasa pengguna anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah 6)apakah budaya organisasi memoderasi kejelasan tujuan sasaran anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran, peran kuasa pengguna anggaran, kejelasan tujuan sasaran anggaran, ,budaya organisasi sebagai variabel moderasi terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah

Manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah : 1) Bagi Pemerintah Daerah:Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penyusunan anggaran yang dapat meningkatkan kinerja aparat Pemerintah Daerah didalam instansi-instansi yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya pada setiap SKPD yang ada

2) Bagi Akademisi:Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya penelitian mengenai pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

3)Bagi Peneliti:Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperluas pengetahuan serta wawasan mengenai partisipasi penyusunan anggaran dan pengaruhnya terhadap kinerja aparat pemerintah daerah

TELAAH PUSTAKA

Hubungan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah penyusunan anggaran bukan hanya untuk menyajikan informasi mengenai rencana keuangan yang berisi tentang biaya biaya dan pendapatan untuk pusat pertanggungjawaban di dalam suatu alat pengendalian ,komunikasi dan evaluasi kerja (kenis,1979) dalam (shelly ,2010) .penemuan empiris yang berkaitan dengan pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah yang

memiliki hasil yang beragam.dalam organisasi sektor publik ,partisipasi anggaran dan pengukuran kinerja tidak sebatas pada penggunaan anggaran ,namun pengukuran kinerja mencakup berbagai aspek yang dapat memberikan informasi yang efektif dan efisien dalam mencapai hasil yang di inginkan sucipto(2009).Aspek aspek yang dapat memberikan informasi yang efektif dan efisien seperti masukan ,kualitas ,keluaran dan hasil.kinerja pemerintah daerah dapat di ukur melalui evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran (permendagri no 13 tahun 2006) dengan menyusun anggaran secara jelas ,di harapkan kerja unit organisasi dapat meningkat.hal ini di dasarkan pada pemikiran bahwa ketika suatu tujuan atau standar yang di rancang secara benar dan di setujui oleh pimpinan,maka pegawai akan bersungguh sungguh dalam tujuan atau standar yang telah di tetapkan oleh pegawai juga memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk mencapainya karena ikut terlibat dalam penyusunannya.Berdasarkan uraian di atas ,dapat di simpulkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah karena dengan adanya keterlibatan aparat pemerintah dalam penyusunan anggaran ,maka akan mengakibatkan peningkatan kinerja dari aparat pemerintah tersebut sesuai dengan target yang di berikan

H1 :terdapat pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah

Hubungan Antara Peran Kuasa Pengguna Anggaran Terhadap

Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah.

Raykes and Jenny (2013) dalam Arfan (2014) menyatakan bahwa individu akan memiliki kinerja terbaik bila di tugasi oleh atasan mereka. Menurut Shintia and David (2013) peran menunjukkan keterlibatan seseorang di dalam menjalankan tugas dan fungsi yang menjadi acuan di dalam menjalankan pekerjaan, oleh karena itu di dalam pengelolaan keuangan daerah juga membutuhkan seorang manajer yang dapat mengatur aktivitas orang-orang yang menjadi bawahannya, mengalokasikan, dan membuat keputusan untuk memaksimalkan kinerja karyawan atau pegawai untuk tercapainya kinerja yang baik. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Sundari (2014) dalam Arfan (2014) menyatakan bahwa peran kuasa pengguna anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah, maka hipotesis yang dapat diambil yaitu :

H2 : peran kuasa pengguna anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah

Hubungan Kejelasan Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah.

Kejelasan tujuan anggaran menunjukkan luasnya tujuan anggaran yang dinyatakan secara jelas, dan di mengerti oleh siapa saja yang bertanggung jawab. Pranesia (2009) dalam Cefrida (2010) menemukan bahwa manajer pemberi reaksi positif dan secara relative sangat kuat untuk meningkatkan kejelasan tujuan anggaran, manajemen tingkat dapat meningkatkan kepuasan kerja, menurunkan ketegangan kerja, dan memperbaiki anggaran yang di

hubungkan dengan sikap, kinerja anggaran, dan efisiensi biaya manajer tingkat bawah secara signifikan meningkatkan kejelasan dan tujuan sasaran anggaran tersebut. Menunjukkan bahwa kejelasan tujuan dapat meningkatkan kinerja manajerial, sedangkan kurangnya kejelasan mengarah pada kebingungan dan ketidakpuasan para pelaksana, yang berakibat pada penurunan kinerja, salah satu penelitian yang mendukung pengaruh positif kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial manajer bekerja tanpa tujuan yang jelas akan di hadapkan pada tingginya ketidakpastian atas pencapaian yang di tetapkan sebelumnya, Eniza Wati (2013) dalam Shelly (2010) bahwa aparat pemerintah daerah kabupaten Kupang dapat mengetahui hasil usahanya melalui evaluasi yang di lakukan secara efektif untuk mengetahui kejelasan sasaran anggaran, sehingga anggaran yang di buat dapat di manfaatkan bagi kepentingan masyarakat.

H3 : terdapat pengaruh kejelasan tujuan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah

Hubungan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Dengan Budaya Organisasi Sebagai Variabel Moderasi

Budaya organisasi mempunyai pengaruh terhadap perilaku, cara kerja dan motivasi para manajer dan bawahannya untuk mencapai kinerja organisasi restu (2012). Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan budaya, di tentukan bahwa dimensi budaya mempunyai pengaruh terhadap penyusunan anggaran dalam

meningkatkan kinerja manajerial. Budaya organisasi merupakan nilai nilai dari keyakinan yang di milikin para anggota organisasi yang di tuangkan dalam bentuk norma norma perilaku para individu atau kelompok organisasin di tempat individu itu bekerja. Penelitian yang di lakukan oleh mohammad (2008) menunjukan budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan yang tinggi.

H4 : terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap partisipasi anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah

Hubungan Peran Kuasa Pengguna Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Dengan Budaya Organisasi Sebagai Variabel Moderasi

peran menunjukkan partisipasi seseorang dalam mewujudkan tujuan organisasi ,di mana peran manajerial pengelolaan keuangan daerah menunjukkan tercapainya mekanisme penyelenggaran pemerintah yang efektif dan efisien,,budaya dapat berpengaruh dalam berperilaku dalam organisasi,termasuk dalam proses implementasi anggaran.budaya yang kuat menunjukkan dengan nilai nilai organisasi yang tercermin di dalam perilaku karyawan dapat meningkatkan kinerja.peran manajer pengelolaan keungan daerah di mana tugas dan fungsinya juga memiki pengaruh cukup kuat di dalam perumusan anggaran yang akan di buat,di mana peran tersebut dapat memungkinkan tercapainya kinerja dengan efektif dan efisien .apabila anggota organisasi dapat merasakan organisasinya sebagai tempat terbaik maka iya akan berperan dan terlibat

di dalam mencapai tujuan yang ada (falikhatun (2007) dalam cefrida (2010) jadi dapat di rumuskan bahwa hipotesisnya adalah

H5 :terdapat pengaruh budaya organisasi di dalam hubungan antara peran kuasa pengguna anggaran dengan kinerja aparatur pemerintah daerah.

Hubungan Kejelasan Tujuan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Dengan Budaya Organisasi Sebagai Variabel Moderasi

budaya organisasi mempunyai kaitan dengan peningkatan kinerja luh putu (2013) mengemukakan bahwa budaya yang kuat berkaitan dengan kinerja yang kuat dan juga berkaitan dengan kinerja yang unggul.budaya yang kuat akan memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku anggota anggotanya dalam anggaran partisipatif Karena kadar kebersamaan dan integritas yang tinggi menciptakan suasana internal berupa kendali pelau anggota anggotanya dalam anggaran partisipatif karena kadar kebersamaan dan integritas yang tinggi menciptakan suasana internal berupa kendali perilaku yang tinggi.

Budaya yang kuat akan membangun kekompakan dan loyalitas sifat sifat tersebut akan menimbulkan sikap untuk memajukan kinerja pemerintah.budaya organisasi sebagai seperangkat asumsi dasar dan keyakinan yang di anut oleh anggota anggota organisasi ,untuk menyelesaikan masalah internal nopa (2013) dalam shelly (2010) menemukan bahwa pelaksanaan anggaran memberikan reaksi yang positif dan secara relative sangat kuat

untuk meningkatkan kejelasan sasaran anggaran reaksi tersebut adalah peningkatan kepuasa kerja ,peningkatan sikap dan efisiensi pelaksanaan anggaran.jika sasaran anggaran di nyatakan secara jelas .dengan demikian karekteristik anggaran dapat berimplikasi pada kinerja aparat pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran sesuai kebijakn umum APBD

H6 : terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap kejelasan tujuan anggaran kinerja aparat pemerintah daerah

METODE PENELITIAN

populasi dalam penelitian ini adalah seluruh dinas dan instansi pemerintah terkait di kota pekanbaru yang berjumlah sebanyak 33 skpd (satuan kerja perangkat daerah) .dasar pemilihan objek penelitian ini adalah karena skpd (satuan kerja perangkat daerah) merupakan pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik.skpd berperan penting dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kota pekanbaru.

Metode analisis data yang di gunakan di dalam penelitian ini menggunakan alat bantu softwere spss versi 20,metode yang di gunakan di dalam analisis data di dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda yaitu

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_1 \cdot X_4 + \beta_5 X_2 \cdot X_4 + \beta_6 X_3 \cdot X_4 + e$$

Keterangan :

Y=kinerja aparatur pemerintah daerah

X1=partisipasi penyusunan anggaran

X2=peran kuasa pengguna anggaran

X3=kejelasan sasaran anggaran

X4=budaya organisasi

X1X4=interaksi antara partisipasi anggaran dan budaya organisasi

X2X4=interaksi peran kuasa dengan budaya

X3X4=kejelasan dengan budaya

β_0 =konstanta

β =koefisien regresi

e=variabel lain

Definisi Operasional dan pengukuran variabel

Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu kinerja aparatur pemerintah daerah (Y),variabel independen yaitu penagruh partisipasi penyusunan anggaran(X1),peran kuasa pengguna anggaran(X2),kejelasan tujuan sasaran anggaran(X3),budaya organisasi (X4)

Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Y)

Kinerja apartur pemerintah daerah adalah seperangkat hasil yang di capai oleh aparat pemerintah daerah dan suatu sistem yang bertujuan menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. pengukuran kinerja aparat pemerintah daerah dalam penelitian ini dapat di lihat dari pencapaian program program berdasarkan target standar kinerja yang telah di tetapkan sebelumnya.variabel ini di ukur menggunakan instrument yang di gunakan oleh millani (1975) dalam mohammad (2008)yang kemudian di kembangkan oleh sardjito (2007) dalam shelly (2010) yang telah di sesuaikan dengan kondisi di Indonesia, skala yang di gunakan

adalah skala likert 1 sampai dengan 5 poin. jawaban dari responden di gunakan untuk menentukan tingkat kinerja aparat pemerintah daerah, yaitu tingkat kinerja aparat pemerintah daerah yang rendah untuk jawaban pada skala rendah dan sebaliknya kinerja aparatv pemerintah daerah yang lebih tinggi untuk jawaban pada skala yang tinggi.

Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran (X1)

Partisipasi anggaran merupakan keterlibatan semua pihak dalam pemberian pendapat, pertimbangan dan usulan dalam mempersiapkan anggaran dan revisi anggaran. partisipasi dalam penyusunan anggaran merupakan suatu pernyataan formal yang di buat oleh manajemen tentang rencana rencana yang akan di lakukan pada anggaran

Peran kuasa pengguna anggaran (X2)

Peran kuasa pengguna anggaran dalam penelitian ini adalah aktivitas manajemen yang berkesinambungan dalam strategi perencanaan dan pengendalian dalam keuangan (rohman,abdul,2007). di mana yang di maksud di dalam penelitian ini adalah kinerja manajemen organisasi sektor publik dalam mengoorganisasikan dan pengaturan secara menyeluruh agar terciptanya sebuah sikap yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Aktivitas dalam hal ini, antara lain perencanaan tujuan dasar dan sasaran; perencanaan operasional; penganggaran; pengendalian dan pengukuran; dan pelaporan serta

analisis. Variabel peran manajer pengelolaan keuangan daerah diukur dengan skala 7 poin.

Kejelasan sasaran anggaran (X3)

Kejelasan tujuan anggaran di definisikan sebagai luasnya sasaran anggaran yang dinyatakan secara jelas dan spesifik, dan di mengerti oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaiannya. instrument yang di gunakan untuk mengukur kejelasan sasaran anggaran terdiri dari 3 item pertanyaan. perihal kejelasan sasaran anggaran yang kemudian di kembangkan oleh ginting (2009) dalam shelly (2010). respon dari responden di ukur dengan skala likert 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju). jawaban dari responden digunakan untuk untuk menentukan tingkat kejelasan tujuan anggaran yang rendah untuk jawaban pada skala rendah dan sebaliknya tingkat kejelasan tujuan anggaran yang lebih tinggi untuk jawaban pada skala tinggi.

Budaya organisasi (X4)

Nilai nilai dari keyakinan yang di miliki para anggota organisasi yang di manifestasikan dalam bentuk norma norma perilaku para individu atau kelompok organisasi yang bersangkutan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Kualitas Data

Uji kualitas data dapat dilakukan melalui uji reliabilitas dan validitas. Uji tersebut masing-masing untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrument. Ada dua prosedur yang dilakukan dalam

penelitian ini untuk mengukur reliabilitas dan validitas data, yaitu: (1) Uji reliabilitas dengan melihat koefisien (Cronbach Alpha), (2) Uji validitas data dilakukan dengan metode Corrected item total correlation melalui SPSS 20.

1. Uji validitas

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r_{tabel} dengan r_{hitung} . Nilai r_{tabel} pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data(n) = 96, maka didapat r_{tabel} sebesar 0.1986

2. Uji Reliabilitas

Untuk pengujian reliabilitas penulis akan melihat dari nilai *cronbach alpha*. Jika nilai *cronbach alpha* besar dari 0,6 maka data yang digunakan dalam penelitian ini reliable, sebaliknya jika nilai alpha lebih rendah dari 0,60 maka nilai tersebut tidak reliable. Dengan bantuan program SPSS dapat dilihat hasil uji reliabilitas sebagai berikut:

Table 1
hasil Uji Reliabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

Cronbach's Alpha	N of Items
.735	6

Sumber: Data Olahan SPSS,2015

Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa reliable, karena memiliki *cronbach alpha* > 0,60.

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas Partisipasi Penyusunan Anggaran

Cronbach's Alpha	N of Items
.815	7

Sumber : Data Olahan SPSS,2015

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas variabel Peran Kuasa Pengguna Anggaran

Cronbach's Alpha	N of Items
.723	7

Sumber : Data Olahan SPSS

Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa reliable, karena variabel peran kuasa pengguna anggaran memiliki *Cronbach Alpha* sebesar 0.723.

Tabel 4
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kejelasan Tujuan Sasaran Anggaran

Cronbach's Alpha	N of Items
.708	6

Sumber:Data Olahan SPSS,2015

Dari Tabel 4 dapat diketahui bahwa reliabel, karena kejelasan tujuan sasaran anggaran memiliki nilai *Cronbach alpha* sebesar 0.708 >0.6

Tabel 5
Hasil Uji Reliabilitas Budaya Organisasi

Cronbach's Alpha	N of Items
.735	6

Dari Tabel 5 dapat diketahui bahwa reliabel, karena memiliki nilai *Cronbach alpha* sebesar 0.735 >0.6.

Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas pada penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai *collinearity statistics* dan nilai koefisien korelasi antara variabel bebas

Hasil Uji Multikolinieritas

Partisipasi Penyusunan Anggaran, Peran Kuasa Pengguna Anggaran, dan Kejelasan Tujuan Anggaran terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (model 1)

Model	Collinerity Statistics	
	Tolerance	VIF
Partisipasi penyusunan anggaran	.681	1.468
peran kuasa pengguna anggaran	.870	1.150
Kejelasan tujuan sasaran anggaran	.770	1.299

Sumber : Data Olahan SPSS,2015

Hasil Uji Multikolinieritas

Partisipasi Penyusunan Anggaran, Peran Kuasa Pengguna Anggaran, dan Kejelasan Tujuan Anggaran terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dengan budaya organisasi sebagai variabel moderating (model 2)

Model	Collinerity Statistics	
	Tolerance	VIF
PPA	.289	9.509
PKPA	.311	8.529
KTSA	.412	8.616
BO	.425	2.749
PA*BO	.321	2.197
PKPA*BO	.135	2.871
KTSA*BO	.433	3329

Sumber : Data Olahan SPSS,2015

Pembahasan

a. Hipotesis 1

Ho: Tidak ada pengaruh Partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah
H1: ada pengaruh Partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah

Maka hasil untuk pengujian hipotesis yang pertama adalah H1 diterima dan H0 ditolak. Dengan demikian Hipotesis 1 yang menyatakan ada pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah terbukti. Dapat disimpulkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran yang merupakan keterlibatan semua pihak dalam pemberian pendapat, pertimbangan dan usulan dalam mempersiapkan anggaran dan revisi anggaran dapat mempengaruhi tingkat kinerja mereka. Hal ini berarti bahwa semakin seorang pegawai ikut atau berpartisipasi dalam penyusunan anggaran maka

akan menciptakan kinerja yang optimal.

b. Hipotesis 2

Ho: Tidak ada pengaruh peran kuasa pengguna angga anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah

H1: ada pengaruh peran kuasa pengguna anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah

Maka hasil untuk pengujian hipotesis yang kedua adalah H1 diterima dan H0 ditolak. Dengan demikian Hipotesis 2 yang menyatakan ada pengaruh peran kuasa pengguna anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah terbukti. Dapat disimpulkan dengan adanya peran kuasa pengguna yang semakin besar akan ikut meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah.

c. Hipotesis 3

Ho: Tidak ada pengaruh kejelasan tujuan sasaran anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah

H1: ada pengaruh kejelasan tujuan sasaran anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah

Maka hasil untuk pengujian hipotesis yang ketiga adalah H1 diterima dan H0 ditolak. Dengan demikian Hipotesis ketiga yang menyatakan ada pengaruh kejelasan tujuan sasaran anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah terbukti. Dapat disimpulkan bahwa semakin luas tujuan anggaran yang dinyatakan secara jelas dan spesifik dan dimengerti oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaiannya akan sangat mempengaruhi tingkat kinerja aparatur pemerintah daerah.

D Hipotesis 4

Ho: Tidak ada pengaruh budaya organisasi terhadap partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah

H1: ada pengaruh budaya organisasi terhadap partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah

Maka hasil untuk pengujian hipotesis yang keempat adalah H1 diterima dan H0 ditolak. Dengan demikian Hipotesis 4 yang menyatakan ada pengaruh budaya organisasi terhadap partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah terbukti. Hal ini menunjukkan bahwa budaya organisasi mempunyai pengaruh terhadap prilaku, cara kerja dan motivasi para manjer dan bawahannya untuk mencapai kinerja organisasi. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang pernah dilakukan oleh Shelly Jelita akhmad (2010 yang menyatakan bhawa budaya organisasi berpengaruh terhadap partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparatur pemerintah daerah.

E Hipotesis 5

Hipotesis yang diajukan:

Ho: tidak ada pengaruh budaya oganisasi terhadap peran kuasa pengguna anggaran dengan kinerja aparatur pemerintah daerah

H1: Ada pengaruh budaya oganisasi terhadap peran kuasa pengguna anggaran dengan kinerja aparatur pemerintah daerah

Maka hasil untuk pengujian hipotesis yang kelima adalah H0 diterima dan H1 ditolak. Dengan demikian Hipotesis 5 yang menyatakan ada pengaruh budaya

organisasi terhadap peran kuasa pengguna anggaran dengan kinerja aparatur pemerintah daerah ditolak.

F Hipotesis 6

Ho: Tidak ada pengaruh budaya organisasi terhadap kejelasan tujuan sasaran anggaran dengan kinerja aparatur pemerintah daerah

H1: Ada pengaruh budaya organisasi terhadap kejelasan tujuan sasaran anggaran dengan kinerja aparatur pemerintah daerah

Maka hasil untuk pengujian hipotesis yang ke enam adalah H1 diterima dan H0 ditolak. Dengan demikian Hipotesis keenam yang menyatakan ada pengaruh budaya organisasi terhadap kejelasan tujuan sasaran anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah terbukti. Dengan demikian berarti semakin tinggi tingkat nilai-nilai dari keyakinan yang dimiliki para anggota organisasi yang dimainfestasikan dalam bentuk norma-norma akan semakin tinggi tingkat kinerja mereka.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan Shelly Jelita Akhmad (2010) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh budaya organisasi terhadap kejelasan tujuan sasaran anggaran dengan kinerja aparatur pemerintah daerah. dan juga penelitian pranesia (2009) budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja oragnisasi, Sehingga budaya organisasi yang kuat memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku anggota-anggotanya dalam anggaran partisipatif karena kadar kebersamaan dan integritas yang tinggi menciptakan suasana internal berupa kendali perilaku yang tinggi.

Budaya yang kuat akan membangun kekompakan dan loyalitas. Sifat-sifat tersebut akan menimbulkan sikap untuk memajukan kinerja pemerintah. Budaya organisasi sebagai perangkat asumsi dasar dan keyakinan yang dianut oleh anggota-anggota organisasi, untuk menyelesaikan permasalahan internal maupun eksternal.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, peran kuasa pengguna anggaran dan kejelasan tujuan sasaran anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah dengan budaya organisasi sebagai variabel moderating.

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja paratur pemerintah daerah. Pengujian ini menerima hipotesis pertama yang menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa semakin seorang pegawai ikut atau berpartisipasi dalam penyusunan anggaran maka akan menciptakan kinerja yang optimal.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel peran kuasa pengguna anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja paratur pemerintah daerah. Pengujian ini menerima hipotesis kedua yang menyatakan bahwa peran kuasa

pengguna anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel kejelasan tujuan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Dengan demikian berarti semakin luas tujuan sasaran anggaran yang dinyatakan secara jelas dan spesifik dan dimengerti oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaiannya akan sangat mempengaruhi tingkat kinerja aparatur pemerintah daerah.
4. Hasil Pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan budaya organisasi mempunyai pengaruh terhadap perilaku, cara kerja dan motivasi para manajer dan bawahannya untuk mencapai kinerja organisasi.
5. Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap hubungan antara peran kuasa pengguna anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menolak hipotesis kelima
6. Hasil pengujian hipotesis keenam menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap hubungan antara kejelasan tujuan sasaran anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menerima hipotesis keenam. Dengan demikian berarti semakin tinggi tingkat nilai-nilai dari keyakinan yang dimiliki para anggota organisasi yang dimainfestasikan dalam bentuk norma-norma akan semakin tinggi tingkat kinerja mereka.

Saran

1. Saran yang dapat penulis berikan di dalam penelitian ini adalah: Untuk SKPD diharapkan untuk dapat meningkatkan kinerjanya dengan cara mempertimbangkan seberapa besar partisipasi penyusunan anggaran, peran kuasa pengguna anggaran, kejelasan tujuan sasaran anggaran dan budaya organisasi yang telah diterapkan selama ini.
2. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat menambah jumlah variabel moderating, karena dalam penelitian ini hanya menggunakan 1 variabel moderating yaitu budaya organisasi

DAFTAR PUSTAKA

Arfan, Muhammad, 2014, Pengaruh Komitmen Organisasional dan Peran manajer Pengelola Keuangan Daerah Terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi pada pemerintahan Kabupaten Gowa).*SKRIPSI*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanudin MAKASSAR.

- Cefrida, Mentari, 2010. pengaruh kejelasan sasaran Anggaran Pengendalian Akutansi Penerapan Akutansi Sektor Publik dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan Terhadap Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KOTA PEKANBARU, *SKRIPSI*. Fakultas Ekonomi, Universitas Riau. PEKANBARU
- Falikhatun, 2007. interaksi informasi asimetri, budaya organisasi dan group cohesiveness dalam hubungan antara partisipasi penganggaran dan budgetery slack
- Mohammad, reizky, 2008. pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Budaya organisasi dan komitmen organisasi sebagai variable moderating ,*SKRIPSI*. fakultas Ekonomi, Universitas Riau. Pekanbaru
- Nopa , Octavia , 2013. pengaruh karkteristik tujuan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah kabupaten rokan hulu
- Putu dian metasari, 2013. pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah dengan kepuasan kerja dan komitmen organisasi sebagai variabel moderating
- Pranesia desiria, 2009, pengaruh komitmen organisasi ,budaya organisasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja oragnisasi sector publik (pemda kuansing)
- Raykes dan jenni, 2013 pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan tujuan sasaran anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah manado
- Restu agusti, 2012 pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah di moderasi variabel desentralisasi dan budaya organisasi (studi kasus pemkab bengkalis)
- Rohman, abdul, 2007, pengaruh peran manajerial pengelola keuangan daerah dan fungsi pengawasan intern terhadap kinerja pemerintah daerah
- Shelly juwita 2010. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah: Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi Dan Locus Of Control sebagai variabel moderating
- Shintia dan david saerang, 2013 pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan peran kuasa pengguna anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten Talaud
- Sardjito dan Osmad Muthaher. 2007 .Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

- Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi Sebagai Moderating. *Simposium Nasional Akuntansi X.*
- Sundari setia, 2014 pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kesenjangan anggaran dengan informais asimetri, budaya organisasi dan ketidakpastian lingkungan sebagai variabel moderating
- Sucipto 2009, pengaruh partisipasi anggaran terhadap kesenjangan anggaran oragnisasi dan kompleksitas tugas terhadap slack anggaran
- Permendagri ni 13 tahun 2006 tentang peran kuasa pengguna anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD tentang pengelolaan keuangan daerah
- Permendagri no 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
- Permendagri no 27 tahun 2013 tentang penyusunan APBD
- Peraturan pemerintah republik Indonesia no 58 tahun 2005
- Undang undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
- Undang undang no 12 tahun 2008 pasal 179 menyatakan APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah